

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Mirza (2011) melakukan analisis pada variabel Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. Variabel independennya ialah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal sedangkan variabel dependennya adalah indeks pembangunan manusia Menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dan data sekunder serta dengan metode penelitian data panel yang menyatakan hasil bahwa kemiskinan berpengaruh negative terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Penelitian Astuti & Astika (2016) Pengaruh Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kesejahteraan Masyarakat. penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali dengan menggunakan data sekunder dari tahun 2009-2013, jumlah data diperoleh sebanyak 45 amatan. Data dianalisa menggunakan teknik analisis linear berganda. Berdasarkan hasil analisis, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, sedangkan jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Diba et al. (2018) menganalisis variabel Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. Jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder yang diambil dari dokumen resmi pemerintah dari 38 kabupaten/kota serta menggunakan metode analisis data panel dan hipotesis, dimana yang memberikan hasil bahwa kemiskinan, PDRB, dan PAD berpengaruh secara simultan terhadap indeks pembangunan manusia di Jawa Timur

Peneliti Ezkirianto & Alexandi (2013) menganalisis hubungan keterkaitan antara Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Per kapita. Jenis data yang digunakan jenis data sekunder dan sumber data dari Indeks

Pembangunan Manusia yaitu badan pusat statistic. serta jenis penelitian deskriptif. hasil dari penelitiannya bahwa terdapat hubungan positif antara Pendapatan Per kapita dan indeks pembangunan manusia.

Jasasila (2020) menganalisis dari pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk terhadap indeks pembangunan manusia Kabupaten Batang Hari 2011-2019 dengan menggunakan data time series. Objek yang diambil yaitu dari kabupaten batang dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Hasil uji hipotesis yang menunjukkan hasil bahwa variabel tingkat kemiskinan tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Sasana (2016) meneliti Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah dan Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah). Objek yang diambil ialah 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dengan kurun waktu 5 tahun. Metode regresi data panel dan uji hipotesis dengan hasil bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. namun pendapatan perkapita tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Sagala (2016) menganalisis dari Pengaruh Pendapatan Per kapita, Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan, dan Belanja Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2007-2012. Objeknya ialah provinsi-provinsi yang berada di Indonesia dengan kurun waktu 6 tahun. Hasil metode regresi data panel yang menunjukkan bahwa Pendapatan Per kapita, Belanja pemerintah bidang Kesehatan, dan Belanja Pemerintah Bidang pendidikan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Bahkan Hanifa (2019) melakukan penelitian dengan menganalisis Pengaruh Pendapatan Per kapita, Gini Ratio, dan Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur 2013-2017. Objek penelitian yang digunakan adalah 38 kabupaten kota di provinsi Jawa Timur dengan kurun waktu 5 tahun dengan regresi data panel serta uji hipotesis yang menyatakan hasil bahwa Pendapatan Per kapita, Gini Ratio, dan Jumlah Penduduk terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur 2013-2017.

B. Landasan Teori

1. Teori Kesejahteraan

Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat ditinjau dari suatu tingkatan hidup tiap masyarakat. Tingkat hidup masyarakat dapat tercermin dari rendahnya kemiskinan, kesehatan yang baik, tingkat pendidikan yang meningkat, dan tingkat produktivitas masyarakat. Hal itu dapat digambarkan sebagai peningkatan tingkat pendapatan masyarakat (Todaro, 2003). Kesejahteraan masyarakat ialah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan paradigma pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat dapat diakibatkan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi yang tanpa disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi dimana keadaan kehidupan bermasyarakat dapat ditinjau dari standar kehidupan masyarakat (Baharudin, 2012)

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia, untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu masyarakat atau kesejahteraan rumah tangga satu wilayah terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu tingkat pendapatan keluarga, komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk konsumsi pangan dan non pangan, tingkat pendidikan keluarga, dan tingkat kesehatan keluarga. Kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kesejahteraan secara keseluruhan anggota masyarakat, kesejahteraan dari beberapa individu atau kesejahteraan bersama.

a. Indeks Pembangunan Manusia

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (2020) Mengungkapkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menekankan orang-orang serta kemampuan mereka yang dijadikan sebagai kriteria utama yang akan digunakan sebagai penilaian perkembangan pembangunan di wilayah dan negara yang bersangkutan, tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja.

IPM juga dapat digunakan untuk mempertanyakan pilihan kebijakan nasional, menanyakan bagaimana dua negara dengan tingkat Gross National Income (GNI) per kapita yang sama dapat berakhir dengan hasil pembangunan manusia yang berbeda. Perbedaan ini dapat menguatkan perdebatan tentang prioritas kebijakan pemerintah. IPM merupakan indikator yang penting untuk digunakan sebagai alat ukur suatu tingkat keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk atau masyarakat). IPM bisa digunakan sebagai penentu peringkat/level pembangunan pada suatu wilayah atau negara. Bagi Indonesia, IPM ialah data yang strategis, karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga biasa digunakan sebagai salah satu indikator penentu Dana Alokasi Umum (DAU). Human Development Index (HDI) atau IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu, 1) umur panjang dan hidup sehat, 2) Pengetahuan, 3) Standar hidup layak

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkasan pencapaian rata-rata dalam dimensi kunci pembangunan manusia : kehidupan yang panjang dan sehat, berpengetahuan dan memiliki standar kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur dengan Indeks Kesehatan, dimensi pendidikan diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) untuk orang dewasa berusia 25 tahun atau lebih, dan tahun yang diharapkan anak-anak usia sekolah memasuki sekolah. Dimensi Standar Kelayakan Hidup diukur dengan pendapatan nasional bruto per kapita. BPS (2015). IPM menunjukkan bahwa bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk atau masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh suatu pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dikenalkan oleh UNDP sejak 1990 serta dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). Rumus IPM adalah sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran} \times 100}$$

b. Indeks Kesehatan

Menurut Utomo (1985) dengan penelitiannya yang berjudul tentang “Penentuan Angka Harapan Hidup”. Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (Life Expectancy) merupakan rata-rata perkiraan usia (dalam tahun) seseorang sejak lahir. AHH menunjukkan derajat kesehatan pada suatu masyarakat. AHH didapat dari hasil sensus dan survei kependudukan. Angka Harapan Hidup pada suatu umur tertentu yang menunjukkan bahwa rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh Individu atau seorang yang telah berhasil mencapai umur tersebut dalam situasi kematian yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (Sulistiani dan Afni 2007).

c. Indeks Pendidikan

Menurut BPS, Angka HLS (Expected Years of Schooling - EYS) merupakan harapan lama sekolah (dalam tahun) yang akan dirasakan oleh anak pada suatu umur tertentu pada masa yang akan datang. Yang diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama pada saat ini. Angka HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan pada sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan berupa lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak

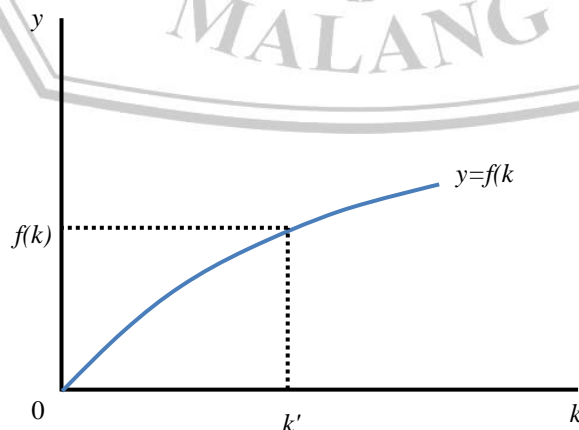
2. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi terhadap IPM

Pembangunan manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sumberdaya manusia yang berkualitas memiliki produktifitas tinggi sehingga mampu meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi dan secara agregat dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Tjiptoherijanto, 1996). Ranis (2006) menyatakan bahwa pembangunan manusia merupakan kontributor dari stabilnya proses pertumbuhan ekonomi dan tidak hanya berkontribusi terhadap tujuan fundamental pembangunan, tetapi juga sebagai faktor penting terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang waktu. Demikian pula pertumbuhan ekonomi menyediakan

tingkatpendapatan yang tinggi sebagai syarat pemenuhan kebutuhan dasar dan perbaikan kualitas modal manusia. Stabilitasnya tingkat pertumbuhan ekonomi juga menciptakan efek repetisi jangka panjang yang penting dalam peningkatan pembangunan manusia. Peningkatan pendapatan sebagai instrumen pembesar kapasitas pemerintah dalam penyediaan fasilitas sosial, pendidikan, dan kesehatan mampu meningkatkan pembangunan manusia pada periode tertentu. Dengan demikian, pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi merupakan faktor input sekaligus tujuan utama dari proses pembangunan.

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Model pertumbuhan neo kalsik solow merupakan pilar yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan ketiga faktor, yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Solow menggunakan asumsi skala hasil tetap (*constan return to scale*) akan baku jika faktor tenaga kerja dan modal dianalisis secara bersamaan dan konsep the law dimishing of return aka terus berkurang jika faktor tenaga kerja dan modal dianalisis secara terpisah. Persamaan yang digunakan model solow, $Y = F(K, L, T)$ dimana Y sama dengan pertumbuhan ekonomi, K sama dengan capital, L sama dengan Tenaga Kerja, dan T sama dengan teknologi. Secara matematis, fungsi produksi yang memiliki constant return to scale. Fungsi produksi per jumlah tenaga kerja dapat digambarkan seperti Gambar dibawah berikut :



Gambar 2.1. Kurva Fungsi Produksi Per Jumlah Tenaga Kerja

Sumber : (Mankiw, 2017).

Fungsi produksi yang digunakan pada teori Solow-Swan didasarkan pada fungsi produksi yang dikembangkan oleh dua penulis Amerika, yaitu Charless Cobb dan Paul Douglas. Sekarang fungsi ini dikenal dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Fungsi tersebut dapat dituliskan dengan $Y = AK^{\alpha}L^{\beta}$, dengan adalah pertambahan produksi yang diciptakan oleh pertambahan satu unit modal dan adalah pertambahan produksi yang diciptakan oleh pertambahan satu unit jumlah tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi awalnya ditentukan dengan proses peningkatan modal. Proses ini hanya ditentukan oleh penawaran dan permintaan terhadap barang dan fungsi produksi terhadap akumulasi modal

Model solow mengasumsikan bahwa fungsi produksi memiliki tingkat pengembalian yang realistis, dimana fungsi produksi sama dengan pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor dari pertumbuhan ekonomi, dimana terdapat angkatan kerja dan yang bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa serta meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita.

a. **Pendapatan Per Kapita**

Menurut (Sukirno, 2018) Pendapatan Perkapita merupakan suatu rata-rata pendapatan penduduk suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan Perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Pendapatan Nasional Pendapatan nasional adalah didapat dari nilai total barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh suatu Negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang.

- 1) Produk Domestik bruto (Gross Domestik Product) atau yang biasa disebut PDB. Produk domestik bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu batas wilayah Negara (domestik) selama satu tahun.

$$GDP = Prod. WNI DN + Prod. WNA$$

- 2) Produk Nasional Bruto (Gross National Product atau GNP) atau yang biasa disebut PNB. PNB meliputi nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam suatu negara (nasional) selama satu tahun. Dalam pengertian PNB ini, termasuk hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara yang ada diluar negeri, tetapi tidak termasuk hasil produksi perusahaan asing yang beroperasi di wilayah negara yang bersangkutan.

$$GNP = Prod. WNI DN + Prod. WNI LN$$

- 3) Pendapatan Perseorangan (Personal Income) atau yang biasa disebut dengan PI. PI merupakan suatu jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam penduduk atau masyarakat termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan serta melakukan suatu kegiatan apapun. Di dalam PI terdapat juga pembayaran transfer (transfer payment). Dimana Transfer payment merupakan suatu penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa proses produksi pada tahun ini, melainkan diambil sebagian dari pendapatan Nasional pada tahun lalu. Contohnya, pembayaran dana pensiun, tunjangan sosial pengangguran, bekas pejuang, bunga utang pemerintah dan lain sebagainya.

$$PI = NNI - (Pajak Perusahaan + Laba Ditahan + Iuran Jaminan Sosial) + Transfer Payment$$

Penambahan tersebut di karena Transfer Payment merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membayar jasa yang diberikan oleh pegawai swasta atau karyawan pemerintah diluar gaji. Oleh karena itu, transfer payment menambah pendapatan bagi suatu karyawan atau tenaga kerja pada suatu instansi pemerintah & swasta. Adapun rumus yang digunakan dalam memperoleh jumlah pendapatan perseorangan atau individu, nilai NNI yang dikurangi dengan pajak laba perusahaan (suatu pajak yang dibayarkan oleh setiap badan usaha kepada pemerintah), laba tidak dibagi atau Laba

ditahan merupakan sejumlah laba ditahan didalam perusahaan untuk berbagai tujuan tertentu seperti, keperluan perluasan perusahaan, dan iuran pensiun merupakan iuran yang dikumpulkan oleh setiap tenaga kerja dan setiap perusahaan dengan maksud untuk dibayarkan kembali setelah tenaga kerja tersebut tidak bekerja.

- 4) Pendapatan yang Harus Dibelanjakan (Disposable Income). Disposable Income merupakan suatu pendapatan yang siap ditujukan untuk membeli barang dan jasa konsumsi, sedangkan sisanya bisa dijadikan sebagai Tingkat pendapatan masyarakat yang berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan standar kelayakan hidup masyarakat, merupakan indikator yang cukup berperan dalam peningkatan standar kualitas atau kelayakan hidup yang diukur sebagai penentu capaian IPM.

Apabila terjadi ketimpangan pendapatan masyarakat akan berdampak terhadap ketimpangan kualitas hidup masyarakat itu pula, yang pada akhirnya juga akan menyebabkan semakin berkurangnya tingkat kualitas hidup manusia pada suatu wilayah atau negara secara kumulatif. Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa Pendapatan juga merupakan faktor penentu capaian IPM pada suatu wilayah atau negara.

4. Teori Ketenagakerjaan

Menurut Mulyadi (2003) tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi dalam perekonomian, selain tanah, modal, kewirausahaan. Seseorang akan mulai bekerja bila utility yang diterima lebih besar daripada disutility tersebut menimbulkan penawaran tenaga kerja. Sementara itu, bagi pengusaha, nilai tambah output barang dan jasa haruslah minimal sama dengan upah yang dibayarkan bagi tenaga kerja. Dengan demikian lahirlah permintaan tenaga kerja. Kondisi saat penawaran dan permintaan bertemu disebut kondisi keseimbangan. Semua tenaga kerja akan terserap dalam perekonomian, atau akan selalu terjadi full employment. Dalam kondisi tersebut, menurut Jean Baptist Say, semua barang dan jasa yang diproduksi akan habis dibeli oleh masyarakat (supply creates its own demand).

Menurut Simanjuntak (2005) bahwa seberapa besar jumlah orang yang bersedia menawarkan jasanya guna membantu terselesaikannya suatu proses produksi, tergantung kepada besarnya penyediaan atau supply tenaga kerja di dalam masyarakat. Jumlah orang yang bersedia untuk menjadi tenaga kerja terdiri dari golongan yang telah bekerja dan golongan yang siap untuk bekerja dan golongan yang sedang berusaha untuk mencari pekerjaan. Untuk itu keadaan ini dinamakan angkatan kerja atau Labour Force, sedangkan untuk konsep angkatan kerja secara menyeluruh dinamakan Total Labour Force.

Menurut Sukirno (2018), efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran di suatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

a. Teori Jumlah Penduduk

Pada umumnya perkembangan jumlah penduduk di negara berkembang sangat tinggi dan besar jumlahnya. Penduduk adalah unsur yang penting dalam kegiatan ekonomi karena menyediakan tenaga kerja, tenaga usahawan dan tenaga ahli yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi. Sebab akibat dari beberapa fungsi ini maka penduduk merupakan unsur menciptakan dan mengembangkan teknologi untuk penggunaan berbagai faktor produksi. Menurut Badan Pusat Statistik (2013) penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sedangkan

Reverend Thomas Maltus pada tahun pada kutipan (Arsyad, 2015) mengemukakan teorinya mengenai hubungan pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Dalam bukunya yang berjudul Essay on

the Principle of Population, Malthus menggambarkan konsep hasil yang menurun (concept of diminishing return). Ia menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu dua kali lipat setiap 30-40 tahun. Di lain sisi disaat yang sama, karena hasil yang menurun dari faktor produksi tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung.

Karenanya pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, oleh karenanya pendapatan perkapita (dalam masyarakat tani didefinisikan sebagai produksi pangan perkapita) akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil atau hanya sedikit diatas tingkat subsisten yaitu pendapatan yang hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan sekedar untuk hidup.

Menurut (Kuncoro, 2004) dikalangan para pakar pembangunan telah ada consensus bahwa Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun semakin membuat kendala bagi pembangunan tabungan, cadangan devisa dan sumberdaya manusia. Terdapat tiga alasan kenapa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan.

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi. Rendahnya sumberdaya perkapita akan menyebabkan penduduk tumbuh lebih cepat sehingga berdampak investasi dalam "kualitas manusia" semakin sulit.
- 2) Banyak negara yang penduduknya masih bergantung terhadap sektor pertanian, sehingga pertumbuhan penduduk dapat mengancam keseimbangan antara sumberdaya alam yang langka serta penduduk. Sebagian besar disebabkan karena pertumbuhan penduduk memperlambat perpindahan penduduk dari sektor pertanian yang rendah produktifitasnya menuju sektor pertanian modern dan pekerjaan modern.

3) Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit untuk melakukan perubahan yang dibutuhkan dalam meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial. Tingginya tingkat kelahiran merupakan penyumbang utama pertumbuhan kota yang cepat.

Penduduk yang selalu berkembang menuntut adanya perkembangan ekonomi secara terus menerus. Ini membuat negara memerlukan lebih banyak investasi. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja (yang terjadi beberapa tahun kemudian setelah pertumbuhan penduduk) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Todaro & Smith, 2013). Jumlah angkatan kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif, sedangkan jumlah penduduk yang lebih besar akan meningkatkan jumlah konsumsi atau ukuran pasar domestiknya. Dengan kata lain, semakin banyak jumlah angkatan kerja yang digunakan dalam proses produksi maka output atau hasil produksi akan mengalami peningkatan.

5. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

Menurut BPS (2019) kemiskinan adalah ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan Hall & Midgley (2004) mengartikan bahwa kemiskinan adalah sebagai kondisi deprivasi materi dan soisal yang menyebabkan individu hidup dibawah satandar kehidupan yang layak atau kondisi dimana individu mengalami deprovasi relative dibandingkan indivisu yang lainnya dalam masyarakat. Pendekatan yang kedua ialah pendekatan relatif dimana kemiskinan ditentukan berdasarkan taraf hidup relative dalam masyarakat. Lebih rinci, (Todaro, 1994) untuk mengukur kemiskinan bisa dilihat dari dua sisi, yaitu :

- a. Kemiskinan absolut (*absolute poverty*) yaitu kemiskinan yang dikaitkan dengan keadaan jumlal penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mereka hidup dibawah tingkat pendapatan riil tertentu atau dibawah garis kemiskinan. Dengan demikian kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan yang diterima dengan tingkat pendapatan yang dibuthkan untuk memperoleh kebutuhan dasar, yakni makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.
- b. Kemiskinan relative (*relative poverty*) adalah kemiskinan yang dilihat dari aspek ketimpangan social, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relative erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Indikator-Indikator Mengenai Kemiskinan Pengukuran mengenai kemiskinan yang selama ini banyak dipergunakan didasarkan pada ukuran atas rata-rata pendapatan dan rata-rata pengeluaran masyarakat dalam suatu daerah. Perluasan pengukuran dengan menyertakan pandangan mengenai dimensi permasalahan dalam kemiskinan mengukur banyaknya individu dalam sekelompok masyarakat yang mendapatkan pelayanan atau fasilitas

untuk kesehatan dan pendidikan. Beberapa perluasan pengukuran lainnya adalah menyertakan dimensi sosial politik sebagai referensi untuk menerangkan terbentuknya kemiskinan. Keseluruhan hasil pengukuran ini selanjutnya dikatakan sebagai indikator-indikator kemiskinan yang digolongkan sebagai indikator-indikator sosial dalam pembangunan. Adapun mengenai beberapa indikator-indikator kemiskinan akan diuraikan berikut ini.

1) Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Ekonomi

Berdasarkan sudut pandang ekonomi, kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dari pendapatan seseorang maupun sekelompok orang untuk mencukupi kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar. Dimensi ekonomi dari kemiskinan diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seseorang baik secara finansial maupun jenis kekayaan lainnya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Peran Pemerintah

Pemerintah sebagai regulator sekaligus dinamisor dalam suatu perekonomian merupakan salah satu pihak yang memiliki peran sentral dalam upaya untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Indonesia, pelaksanaan penanggulangan permasalahan kemiskinan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan yang bekerja sama dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Sosial.

3) Indikator Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Kesehatan

Berbagai data kemiskinan yang dihimpun menyebutkan adanya keterkaitan antara kemiskinan dan kualitas kesehatan masyarakat. Rendahnya kemampuan pendapatan dalam mencukupi/memenuhi kebutuhan pokok menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk menjangkau atau memperoleh standar kesehatan yang ideal/layak baik dalam bentuk gizi maupun pelayanan kesehatan yang memadai. Dampak dari kondisi seperti ini adalah tingginya resiko terhadap kondisi kekurangan gizi dan kerentanan atau resiko terserang penyakit menular.

C. Hubungan Antar Variabel

1. Tingkat Pertumbuhan Penduduk dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pertumbuhan penduduk akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia jika itu dapat direalisasikan dengan baik oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan ketika jumlah penduduk meningkat maka kebutuhan masyarakat akan meningkat, konsumsi masyarakat akan meningkat dan lapangan kerja akan meningkat pula. Berpengaruh terhadap IPM juga dikarenakan tingginya Tingkat pertumbuhan penduduk akan berimplikasi negatif terhadap perencanaan peningkatan kesejahteraan penduduk serta dengan meningkat Tingkat pertumbuhan penduduk pula, maka kualitas sumber daya manusia semakin tidak merata dan tidak hanya itu saja, tetapi meningkatnya arus migrasi akan berdampak pada bagi pembangunan daerah atau nasional serta bagi penduduk dan negara. Dengan adanya migrasi maka suatu pembangunan akan berkembang karena kontribusi dari para pendatang serta keahliannya yang dibawa sehingga akan meningkatkan pendapatan.

Hasil dari penelitian Hanifa (2019) menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara jumlah penduduk terhadap indeks pembangunan manusia. Lalu dapat dikatakan bahwa semakin banyaknya penduduk maka semakin sempit lapangan pekerjaan yang tersedia. Dan juga semakin meningkat pada jumlah pengangguran. Lalu dalam salah satu bahan perdebatan di antara ahli ekonomi maupun ahli demografi. Kemudian penelitian tersebut dapat dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda dan serta dapat menyimpulkan bahwa jumlah penduduk dapat mendorong, menghambat, atau tidak memiliki dampak berarti bagi pertumbuhan ekonomi.

2. Pendapatan Per kapita dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pemerintah dapat meningkatkan kualitas sumber daya dengan perbaikan kualitas dan juga pelayanan bidang kesehatan, pendidikan agar pendapatan per kapita masyarakat dapat terwujud dan kemiskinanpun dapat teratasi. Meningkatnya indeks pembangunan manusia, berarti meningkat pula kesejahteraan masyarakat dan angka kemiskinan pun akan menurun.

Pendapatan Perkapita mencerminkan pendapatan individu pada suatu negara. Hasil dari penelitian Sagala (2016) bahwasanya terdapat pengaruh positif Pendapatan Per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dimana Pendapatan juga berpengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakat, dimana tingginya pendapatan maka secara otomatis masyarakat tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari selain itu tingkat daya beli masyarakat juga berpengaruh terhadap Standar Layak Hidup pada IPM. Jadi setiap meningkatnya Pendapatan maka tingkat daya beli masyarakat pada suatu negara juga ikut naik yang kemudian hal ini berdampak terhadap peningkatan IPM dari negara yang bersangkutan.

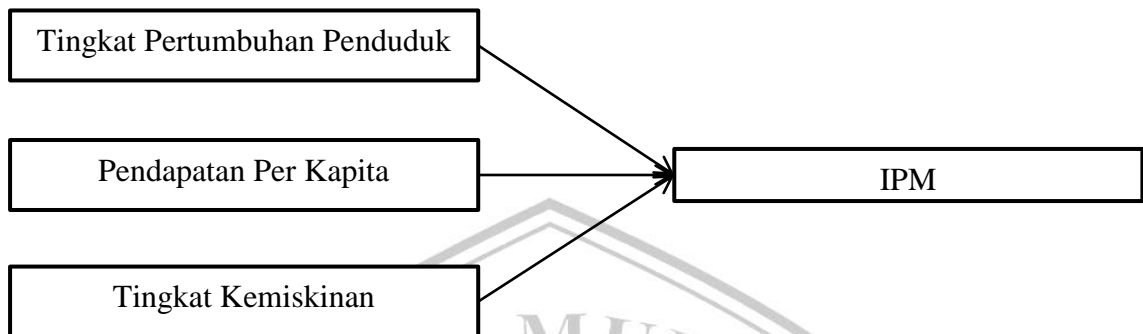
3. Tingkat Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Pada garis kemiskinan semakin meningkat dan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka maka akan terciptanya lingkaran setan dimana akan terlihat dari rendahnya pendapatan nyata sehingga akan mengakibatkan permintaan menjadi rendah sehingga investasi juga rendah dan dapat mengurangi produktivitas. Selain itu, lingkaran setan juga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumberdaya alam, dimana perkembangan sumberdaya alam itu tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya pemerintah terutama dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia. Hasil dari penelitian Mirza (2011) menunjukkan hasil bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh negative terhadap indeks pembangunan manusia. Kenyataannya dapat dilihat dengan melakukan investasi pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diperlihatkan dengan meningkatnya kualitas pengetahuan dan kualitas keterampilan individu.

D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan etiga variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia yaitu Jumlah Penduduk, Pendapatan Per kapita, Tingkat Kemiskinan. Untuk mempermudah kegiatan penelitian ini berikut gambar kerangka pikir yang akan di bahas dalam penelitian ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

E. Hipotesis

Hipotesis rumusan masalah yang diberikan harus berdasarkan pada kajian teori empiris. Maka dibuat hipotesis sementara pada penelitian berikut :

Diduga variabel Tingkat Pertumbuhan Penduduk, Pendapatan Per kapita, dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia